

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan taraf kehidupan serta kesejahteraan rakyat, langkah yang dilakukan oleh suatu negara salah satunya yaitu dengan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dengan terencana, hal demikian dilakukan demi terciptanya kondisi yang menuju semakin baik. Baik di negara maju maupun negara berkembang, kesenjangan ekonomi telah menjadi permasalahan yang umum. Dan agar suatu pembangunan ekonomi merata, alangkah baiknya diterapkan disemua negara. Bukan hanya dilakukan oleh pemerintahan yang ada dipusat, pembangunan dalam ekonomi ini sebaiknya juga dilaksanakan di daerah-daerah lain dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat yang ada dapat ikut merasakan manfaat dari pembangunan ini (Mardiana, 2012).

Kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah telah disusun dalam koridor perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kebijakan perencanaan jangka panjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan diprioritaskan pada: (1) pengembangan wilayah yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan; (2) percepatan pembangunan melalui pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri untuk mengembangkan daerah tertinggal disekitarnya dengan memperhatikan keterkaitan mata rantai produksi dan distribusi; (3) keberpihakan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah di daerah tertinggal dan berpotensi cepat tumbuh secara ekonomi; (4) memperhatikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga; (5) peningkatan kapasitas kelembagaan, keuangan dan legislatif pemangku kepentingan pembangunan; serta (6) penanggulangan kemiskinan yang memperhatikan hak-hak dasar masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

Selama ini proses dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam konteks nasional telah menimbulkan masalah baru pembangunan dalam bahagian yang cukup dikatakan besar. Karena selama ini, pembangunan hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara makro, sehingga dampak kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah terabaikan. Wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan mengalami terserapnya sumber daya dan investasi lebih terkonsentrasi, berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah yang mengalami pengembangan malah terjadi pengikisan sumber daya alam. Kemudian muncul masalah baru yakni kesenjangan yang merugikan pada bahagian pengerjaan pembangunan seperti yang awalnya ingin dicapai dalam sisi makro.

Disetiap proses pembangunan, munculnya masalah disparitas dalam pembangunan ekonomi sangat umum terjadi dinegara berkembang. Pembangunan ekonomi lebih banyak dilaksanakan pada daerah-daerah yang terdapat sumber daya yang berpotensi baik. Sedangkan potensi yang dianggap unggul dan sumber daya disetiap daerah berbeda. Hal ini menyebabkan hambatan dalam rangka untuk meratakan pembangunan ekonomi karena pertumbuhan dalam ekonomi hanya terkonsentrasi pada beberapa wilayah yang memiliki kapasitas dan sumber pembangunan dari alam yang baik. Sehingga kesenjangan pembangunan ini dapat terjadi karena disetiap daerah berbeda adanya keunggulan dari sumber daya serta masalah yang dimiliki (Sjafrizal, 2008).

Dalam rangka mengurangi permasalahan tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya memberlakukan pemberian otonomi daerah dengan penyerahan sebagian besar urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan kebijakan ini untuk memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Dengan ini pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah.

Dalam otonomi daerah dibidang keuangan, pemerintah pusat telah melakukan kebijakan desentralisasi fiskal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor

25 tahun 1999 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Misi utama kedua Undang-Undang tersebut adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 140.529,15 milyar. Sedangkan menurut harga berlaku adalah sebesar Rp. 164.898,84 milyar. PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 32,13 juta, meningkat menjadi Rp. 34,41 juta pada tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam hal pelaksanaan pembangunan, termasuk di dalamnya daerah-daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan ekonomi idealnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah 5,41 persen yang berada di atas rata-rata nasional yang hanya tumbuh 4,98 persen, namun ketimpangan pembangunan ekonomi yang dihitung dengan Indeks Theil pada tahun 2015 menunjukkan angka sebesar 0,0286.

Pertumbuhan ekonomi di kota lebih besar variasinya dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Konsentrasi kegiatan ekonomi juga terpusat di kota dibandingkan di kabupaten yang juga didukung oleh alokasi dana pembangunan yang dominan di kota. Sementara itu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa akibat terbatasnya fasilitas transportasi dan komunikasi juga menjadi penyebab rendahnya pendapatan perkapita.

Menurut Sjafrizal (2009), permasalahan yang cukup serius seringkali terjadi pada tidak meratanya pembangunan atau disparitas disebabkan tidak meratanya

pembangunan wilayah secara spasial. Dibeberapa daerah mengalami tingkat pertumbuhan yang cepat sedangkan daerah-daerah lainnya mengalami lambatnya pertumbuhan. Kurangnya sumber daya yang ada didaerah-daerah tersebut menyebabkan tidak adanya kemajuan yang dikatakan sama dalam hal pertumbuhan, juga karena para penanam modal yang lebih cenderung melihat kualitas seperti sarana dan tersedianya prasarana yang baik dalam pemilihan daerah, serta adanya ketidakmerataan dari pemerintah yang ada dipusat ke daerah disegi distribusi pendapatan. Semakin melebarnya tingkat kesenjangan dari sosial ekonomi yang terjadi antar wilayah disisi lain dikarenakan pendekatan pembangunan selama ini terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya dari kesenjangan inilah timbul masalah dalam konteks makro.

Satu satu hal yang menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir, oleh karenanya salah satu target yang perlu dicapai dalam proses menciptakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah. Cepatnya pertumbuhan ekonomi tentulah harus didukung oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana yang cepat pula yang nantinya diharapkan menjadi penggerak roda pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya kesejahteraan yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan dasar dari suatu pembangunan. Pembangunan kerap kali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia juga dirasa perlu untuk dilakukan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Merujuk kepada *United Nation Development Program*, ada beberapa indikator yang bisa dilihat dari pembangunan manusia yaitu dapat diukur melalui mutu kesehatan, mutu pendidikan serta kemampuan ekonomi.

Dari uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian untuk menguraikan ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat dan diperlukan pemahaman faktor-faktor yang menjadi penyebab serta memberikan kebijakan yang dapat dirumuskan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat.



## **B. Perumusan Masalah**

Pada awal pembangunan semua wilayah mempunyai pola perkembangannya yang terus meningkat, namun setelah beberapa tahun berjalan ternyata muncul ketimpangan pembangunan antar wilayah, realita tersebut dikarenakan kemampuan menciptakan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah tidak seragam atau bervariasi. Ketersediaan sumber daya alam harus sejalan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta sarana infrastruktur yang mendorong peningkatan kesejahteraan daerah yang tertinggal.

Adapun analisis ketimpangan wilayah sangat penting dilakukan agar lebih mudah dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang mampu mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah tersebut. Masalah ketimpangan antar wilayah masih menjadi persoalan yang penting untuk diatasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apabila tidak ada usaha untuk mengurangi masalah ketimpangan ini maka akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kondisi sosial, ekonomi dan politik terutama dampak buruk pada pencapaian sasaran pembangunan.

Dari uraian latar belakang dan masalah yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Kebijakan seperti apa yang dapat dirumuskan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat.
3. Merumuskan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dapat dicapainya tujuan penelitian dan terjawabnya masalah dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan.

1. Untuk akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rujukan informasi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai masalah ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sumatera Barat maupun daerah lain dan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan tersebut.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dan perencana pembangunan dalam menyusun kebijakan di Provinsi Sumatera Barat dalam kaitannya mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sumatera Barat.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antardaerah akan dihitung berdasarkan besarnya koefisien ketimpangan dengan menggunakan metode analisis *Indeks Theil*. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Barat akan menggunakan data *time series* dari tahun 2001- 2015.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dari tiap-tiap bagian dalam penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**

Penulis akan mengemukakan beberapa pokok pikiran, yang melandasi pemilihan judul penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, batasan dan sistematika dalam penulisan.

**BAB II Studi Literatur**

Berisikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian, yang mengemukakan pendapat dan pernyataan para pakar dan ilmuan, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan teori yang mendukung dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III Metodologi Penelitian**

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis dan sumber data, metode analisis, serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai kondisi fisik, keadaan sosial budaya, dan perkembangan kondisi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

**BAB V Hasil dan Pembahasan**

Penulis akan membahas permasalahan dan temuan-temuan berdasarkan penelitian ini serta implikasi kebijakan.

**BAB VI Kesimpulan dan Saran**

Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini akan dibuatkan dalam bentuk kesimpulan dan juga saran.

